

## **Media Sebagai Kekuatan Politik: Studi Kasus Project Multatuli Sebagai Perlawanan Media Pers Alternatif Terhadap Oligarki di Indonesia**

**Makkah Ramadhan Putra Rizal**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu, Politik Universitas Indonesia, Depok

Email: [makkah.Ramadhan01@ui.ac.id](mailto:makkah.Ramadhan01@ui.ac.id)

**Syaiful Bahri**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok

Email: [s.bahri@office.ui.ac.id](mailto:s.bahri@office.ui.ac.id)

---

### **Abstrak**

Dalam konteks era yang ditandai oleh dominasi oligarki dan konglomerasi media, peran media alternatif dalam politik muncul sebagai faktor yang signifikan. Penelitian ini menginvestigasi signifikansi media alternatif yang kontra-oligarki dalam menghadapi kekuatan oligarki media, dengan mengambil studi kasus Project Multatuli sebagai representasi pers alternatif dari upaya media untuk menjadi antitesis terhadap kekuatan oligarki media yang mendominasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi literatur sebagai metode untuk mengambil dan mengolah data dalam menelaah peran Project Multatuli dalam mengungkapkan ketidakseimbangan informasi dan menyuarakan kelompok marjinal yang selama ini kerap luput dari pemberitaan arus utama. Penelitian ini menggunakan teori media kontra oligarki sebagai landasan analisis tentang bagaimana kondisi oligarki media serta kemunculan media alternatif sebagai penyeimbang informasi yang didominasi oleh oligarki media yang ada di Indonesia. Implikasi dari penelitian ini berkaitan dengan pentingnya pluralitas media dan akses terbuka terhadap informasi sebagai elemen penting serta bagaimana melihat peran media sebagai pilar keempat demokrasi yang memiliki peran dalam menjaga keseimbangan politik dan demokrasi yang sehat serta menjadi medium untuk menyuarakan mereka yang luput dari pemberitaan arus utama.

**Kata Kunci: Demokrasi, Kontra Oligarki, Oligarki Media, Project Multatuli, Politik.**

---

### **Abstract**

*In the context of an era marked by the dominance of oligarchy and media conglomerates, the role of alternative media in politics emerges as a significant factor. This research investigates the significance of counter-oligarchic alternative media in confronting the power of media oligarchy, using the Project Multatuli as a case study representing alternative press efforts to be the antithesis to the dominating media oligarchy. This research employs a qualitative approach, utilizing literature study as a method to gather and process data in examining the role of Project Multatuli in exposing information imbalances and voicing marginalized groups often overlooked by mainstream reporting. The study utilizes the theory of counter-oligarchic media as the analytical foundation for understanding the conditions of media oligarchy and*

*the emergence of alternative media as a balance to the information dominated by existing media oligarchy in Indonesia. The implications of this research relate to the importance of media pluralism and open access to information as crucial elements, as well as how to view the role of media as the fourth pillar of democracy that plays a role in maintaining political balance and a healthy democracy, and as a medium for voicing those overlooked by mainstream reporting.*

**Keywords: *Contra Oligarchy, Democracy, Media Oligarchy, Project Multatuli, Politics.***

---

## **PENDAHULUAN**

Melihat posisi Media dan Pers dalam negara kita dapat melihat sebuah pandangan tradisional dalam menganalisanya, Menurut Bulla dalam Kaid dan Holtz-Bacha (2008) menempatkan media dalam posisi keempat dalam tingkatan, dimana posisi teratas adalah pemerintah yang disusul oleh hukum kemudian institusi agama kemudian Media dan Pers. Penempatan posisi ini dipengaruhi oleh apa saja yang dianggap prestise juga memiliki pengaruh yang besar dalam sebuah negara dan yang mengejutkan bahwa Pemerintah berada diatas hukum merupakan bentuk bagaimana otoritas pemerintah yang absolut pada negara “Demokrasi” yang bisa membuat hukum tunduk padanya merupakan faktor utama hal tersebut terjadi. Pendapat yang lain dalam konteks melihat demokrasi dari sebuah negara, media dan pers dianggap menjadi pilar keempat demokrasi setelah Trias Politica (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) walaupun bukan merupakan lembaga negara, media dan pers dianggap menjadi bagian yang dapat menopang pondasi demokrasi dengan fungsi utama menjadi pengawas (watchdog) dari ketiga lembaga negara dengan membawa kepentingan publik (Kovach & Rosenstiel, 2001). Dengan catatan bahwa media maupun lembaga pers terbebas dari segala kepentingan atas kepemilikan untuk menciptakan sebuah akuntabilitas dari produk yang dihasilkan dalam bentuk berita, bilamana independensi ini dicemari oleh penguasaan media oleh segelintir pihak untuk kepentingan bisnis dan politik maka jalan keluarnya adalah membentuk sebuah lembaga pers yang bebas dari kepemilikan perseorangan dan dengan menghasilkan sebuah produk berita yang bebas dari segala jenis advertorial serta bisa mengangkat isu dari berbagai lini khususnya dalam rangka mengawasi pemerintah melalui pembeberan fakta yang terjadi di lapangan.

Pasca pengakuan kedaulatan Indonesia di tahun 1949, lahir optimisme untuk menjalankan sebuah pemerintahan serta negara yang demokratis, salah satunya dalam hal kebebasan pers. Pada era tersebut, masyarakat merasakan adanya optimisme itu karena

setiap orang dapat mendirikan lembaga pers (Surat kabar), dengan syarat memiliki modal yang cukup tanpa memerlukan surat izin yang diterbitkan oleh pemerintah. Hal ini juga didorong oleh dukungan pemerintah kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga-lembaga persnya sendiri (Suwirta, 2008). Namun, perubahan perihal kebebasan pers terjadi di Era demokrasi terpimpin yang diakibatkan oleh perubahan iklim politik di Indonesia. Pemerintahan orde lama mulai membatasi dan bersikap represif kepada pers dalam agenda untuk mengontrol pemberitaan yang tidak sejalan atau cenderung mengkritik pemerintahan Presiden Soekarno (Padiatra, 2015). Kemudian, Setelah era Orde Lama berganti menjadi Orde Baru di Indonesia, kebebasan pers kembali dibatasi oleh Undang-Undang (UU) No. 21 Tahun 1982 yang mengharuskan lembaga pers memiliki Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dari pemerintah. Penyensoran ketat membuat konten pers harus melewati uji kelayakan pemerintah, membatasi narasi kontra terhadap pemerintah. Media alternatif mikro muncul sebagai respons atas pengawasan ketat, tetapi tetap terdeteksi oleh pemerintah. Sebagai upaya kontrol lebih lanjut, diterbitkan Surat Tanda Terbit (STT) oleh Menteri Penerangan (Agustini, 2019; Pratama & Gischa, 2020).

Kebebasan Pers akhirnya menemui harapan lagi setelah peristiwa Reformasi dan Momen krisis moneter tahun 1998 yang mengakibatkan pelengseran Presiden Soeharto setelah 32 tahun memerintah. Momentum ini menjadi poin penting dalam hubungan antara media dan pers di Indonesia karena sejak era orde lama hingga orde baru, banyak pembatasan dan pembredelan terhadap media dan pers (Nugroho dkk., 2013; Power & Warburton, 2020). Momentum ini juga digunakan oleh masyarakat menuntut demokrasi dan kebebasan pada setiap aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat salah satunya adalah tuntutan untuk bisa mendapatkan kebebasan pers. Tuntutan masyarakat untuk mengembalikan kebebasan pers di Indonesia dapat dilihat ketika disahkannya UU No. 40 tentang Pers serta UU No. 32 Tahun tentang Penyiaran membuat media dan pers mengalami perubahan dalam hal perlindungan hukum dan peran pers dalam menjaga demokrasi khususnya sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah (Khairida dkk., 2017). Lahirnya UU ini juga membuat Indonesia mengalami kenaikan Indeks Demokrasi yang sebelumnya berada di level *Authoritarian Government* menjadi *Partly Free* (Borgh & Terwindt, 2014). pencapaian pada tahap ini sudah dianggap kemajuan besar dalam perkembangan demokrasi Indonesia dari sudut pandang media dan pers karena artinya selangkah lagi sembari proses pematangan demokrasi Indonesia bisa memasuki level *Full Freedom*.

Pasca reformasi kemunculan media alternatif semakin banyak dan dalam berbagai macam bentuknya seperti radio, Contoh: *Marsinah FM* sebuah saluran radio yang dikelola oleh Forum Buruh Lintas Pabrik (FBLP) dimana topik yang dibahas di saluran ini adalah perjuangan perempuan dalam menuntut kesetaraan dan kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi gender serta isu ketimpangan yang dialami oleh buruh khususnya buruh pabrik perempuan (Ramadhiyanti & Salendu, 2022). Bidang pers juga dapat dilihat dari kemunculan Project Multatuli pada 21 Mei 2021, bertepatan dengan peringatan 23 tahun mundurnya presiden Soeharto sekaligus menandakan akhir dari rezim orde baru yang mengekang media sangat ketat. Project Multatuli berdiri sebagai media pers yang bertumpu pada kepemimpinan kolektif yang tidak terikat oleh satu tokoh maupun terafiliasi dengan konglomerasi media (Tivany, 2022). Menurut situs Project Multatuli mereka memiliki tujuan melayani publik dengan menyuarakan suara yang terpinggirkan, Komunitas yang terabaikan, dan isu mendasar yang tersisihkan dengan menjamin independensi melalui tidak adanya iklan maupun afiliasi terhadap bisnis media atau pihak tertentu (Project Multatuli, t.t.). Namun, demi kelangsungan operasional Project Multatuli menawarkan skema bisnis media yang dengan berbasiskan “langganan” agar para pelanggan yang sudah menyisihkan uangnya dapat dengan leluasa menikmati berita maupun liputan khusus yang dibuat oleh para jurnalis dari Project Multatuli. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang peran media alternatif yang menjadi media kontra-oligarki sebagai kekuatan politik di Indonesia. Rumusan pertanyaan penelitian ini ialah **“Bagaimana bentuk kekuatan politik Project Multatuli sebagai pers alternatif terhadap dominasi oligarki media di Indonesia?”**

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara untuk menghimpun data primer yang bersumber dari narasumber yang merupakan jurnalis serta pimpinan redaksi dari Project Multatuli serta studi pustaka untuk mengumpulkan data sekunder yang bersumber dari buku, artikel, serta berita yang digunakan untuk menunjang tulisan ini. Menurut Creswell (2014), wawancara adalah proses tanya jawab antara peneliti dengan narasumber untuk menggali informasi yang didapat, adapun model wawancara yang digunakan adalah daring menggunakan aplikasi zoom dengan memberikan pertanyaan terbuka untuk mendapatkan informasi yang luas dan komprehensif. Sedangkan studi pustaka adalah proses di mana peneliti mengumpulkan, mencari, dan mengatur

sumber-sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dijalankan. Tujuan utama dari studi pustaka adalah untuk memperkaya materi penelitian dengan menyajikan sebuah ringkasan tertulis mengenai artikel, jurnal ilmiah, buku, dan dokumen-dokumen lain yang relevan dalam domain penelitian tersebut. Dengan kata lain, studi pustaka merupakan langkah penting dalam penelitian yang membantu peneliti untuk mengidentifikasi dan menggambarkan kerangka pengetahuan yang ada terkait dengan topik penelitian.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Pasca-reformasi, salah satu premis yang utama yang melekat dalam struktur ekonomi politik dan industri media di Indonesia adalah reorganisasi dari kekuatan politik predatoris yang diinisiasi oleh oligarki (Hadiz & Robison, 2013). Studi dokumen yang dilakukan terhadap beberapa literatur menemukan bahwa kekuatan-kekuatan oligarki ini tidak hanya memiliki kepentingan untuk mengakumulasi kapital melalui spasialisasi dan monopolisasi media, melainkan juga mempengaruhi secara langsung proses politik dan pengambilan kebijakan di ranah pemerintahan dan legislative (Aspinall & Berenschot, 2019; Ford & Pepinsky, 2013; Winters, 2011, 2013). Penetrasi dari kekuatan-kekuatan oligarki — khususnya kekuatan media — terhadap level pemerintahan dan legislasi telah melahirkan skema dan struktur ekonomi politik industri media pasca-reformasi: bahwa media - secara spesifik media yang dikuasai oleh oligarki - memiliki kecenderungan untuk menjadi instrumen politik praktis dari politisi-politisi tertentu. Kondisi ini adalah patologi bagi demokrasi, mengingat bahwa hak atas kebebasan informasi dan pers merupakan salah satu agenda utama dari reformasi media pasca-reformasi.

Sebagai respon terhadap kondisi struktural ini, muncul media-media baru yang berorientasi sebagai antitesis terhadap media-media arus utama yang semakin ter subordinasi di bawah kekuatan oligarki media. Media-media ini diartikulasikan oleh Tapsell (2021) sebagai media kontra-oligarki. Media ini memiliki orientasi untuk menyuarakan informasi-informasi yang tidak diberitakan oleh media yang berafiliasi dengan oligarki bukan karena inkapabilitas media tersebut, melainkan karena tekanan struktural, relasi kuasa, dan kepentingan dari para oligarki tersebut yang kerap bertentangan dengan informasi-informasi tersebut. Media ini kemudian bertransformasi menjadi pilar penjaga demokrasi, di era dimana struktur ekonomi-politik di Indonesia semakin menunjukkan regresi demokrasi (Haris, 2019; Wijayanto dkk., 2021). Dalam situasi tersebut, diperlukan sebuah lembaga yang bisa menjadi pengawas di luar

penyelenggara negara yang bisa membawa kepentingan rakyat untuk mengawasi segala penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara negara maupun individu serta kelompok yang berkaitan dengan aktor penyelenggara negara.

Mengutip tesis yang ditulis oleh Tivany (2022) dalam penelitiannya ia menyebutkan bahwa model bisnis yang diterapkan oleh Project Multatuli memiliki kemiripan dengan Tortoise Media yang didirikan oleh James Harding seorang jurnalis senior dari BBC sekaligus mantan Direktur BBC News, serta editor dari koran The Times yang berbasis di Inggris. Kemudian juga ada ProPublica yang didirikan oleh Paul Stagner, mantan managing director dari The Wall Street Journals, berbasis di Amerika Serikat yaitu Paywall-Based Subscription dimana model ini berbasis pada biaya langganan yang menjadi pemasukan dalam rangka menjalankan operasional untuk menjaga independensi pemberitaan serta kebebasan dalam membuat produk berita (Priyonggo & Adnan, 2021). Cara kerja dari model ini adalah dengan mengunci sejumlah konten dalam sebuah publikasi dan untuk bisa membaca konten yang dikunci tersebut maka harus berlangganan dengan membayar sejumlah uang. Bukan hanya model bisnis namun juga latar belakang pendiri dari kedua media ini memiliki kemiripan dengan Project Multatuli dimana salah satu pendirinya merupakan jurnalis sekaligus mantan Managing Editor dari The Jakarta Post, Evi Mariani. Model bisnis yang diterapkan oleh media ini berbasis pada biaya langganan yang menjadi pemasukan utama dalam rangka menjalankan operasional. Model bisnis ini dapat menjaga independensi pers, namun nyatanya hal ini menitikberatkan pendapatan dari biaya berlangganan belum dapat dinyatakan sebagai sebuah langkah yang optimal karena di Indonesia sendiri bahkan oleh media arus utama model ini juga diikuti. Namun pendapatan yang didapat tidak terlalu signifikan karena banyak masyarakat Indonesia yang masih menganggap bahwa berlangganan untuk membaca berita digital masih dianggap sebagai sebuah barang yang mahal (Wagstaff, 2010).

Dalam melihat penelitian sebelumnya tentang media alternatif yang mencoba menjadi corong untuk menyuarakan kelompok marginal maupun untuk melawan narasi arus utama dapat merujuk terhadap penelitian yang dilakukan oleh Yoedtadi dan Pribadi (2020) tentang bagaimana magdalene.id dan konde.co sebagai media alternatif berusaha untuk melawan narasi patriarkis yang kerap muncul dalam media arus utama, penelitian tersebut menyoroiti bagaimana media alternatif, seperti Konde.co dan Magdalene.co, memberikan platform bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan dan memperjuangkan kesetaraan

gender serta hak-hak perempuan. Tulisan tersebut juga membahas tantangan yang dihadapi oleh media alternatif, terutama dalam hal pendanaan operasional dan kebutuhan untuk menavigasi keseimbangan antara idealisme dan viabilitas komersial. Contohnya adalah bagaimana magdalene.id membatasi pendanaan yang berasal dari perusahaan rokok atau produk kosmetik khususnya yang menawarkan untuk “memutihkan” kulit dimana hal ini merupakan salah satu bagian dari menjaga idealisme magdalene dalam menyuarakan isu perempuan. Kemudian dalam melihat posisi media sebagai pilar keempat demokrasi yang memiliki fungsi sebagai pengawas serta lembaga yang bisa membawa kepentingan rakyat khususnya dalam kritik terhadap pemerintah memiliki posisi yang sangat penting, hal ini dapat dilihat dalam publikasi yang ditulis oleh Harizuandini (2022) dengan mengambil periode waktu menjelang Insiden 27 Juli 1996. Harizuandini berpendapat bahwa kemunculan media alternatif merupakan respons terhadap kontrol rezim dan monopolisasi media utama. Medium dari media alternatif ini, termasuk tabloid, majalah, buletin, dan selebaran, yang mewakili berbagai kelompok yang kritis terhadap pemerintah, seperti MARI, PIJAR, AJI, dan FKPMJ. Mereka menyediakan platform bagi kelompok-kelompok pro-demokrasi untuk menyampaikan gagasan dan tuntutan perubahan kepada rezim, berfungsi sebagai alat perlawanan terhadap pemerintah, serta membantu mengkonsolidasikan massa untuk mobilisasi dan demonstrasi. Hal yang menarik dari tulisan ini bahwa kita dapat melihat media bukan hanya sebagai penyalur informasi tapi sebagai sebuah sarana untuk mengkonsolidasikan massa yang resah atas kondisi politik saat itu, hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Faravonona (2023) bahwa media khususnya pada media berita memiliki pengaruh yang kuat dalam meregulasi emosi dari masyarakat khususnya dalam membentuk opini publik dan menciptakan sebuah kondisi sosial yang baru.

## **KERANGKA TEORETIS**

Dalam menganalisis topik yang hendak dibahas, peneliti menggunakan teori Media Kontra-Oligarki yang dikemukakan oleh Tapsell (2021) serta konsep pers alternatif yang menjadi bagian dari media alternatif yang dikemukakan oleh Dagron (2004) dan Hamilton (2000).

### **Media Kontra-Oligarki**

Tapsell, sebagai ilmuwan yang mengabstraksikan teori ini, berangkat dari analisis dalam melihat struktur industri media di Indonesia. Dalam pandangannya, media sebagai

kekuatan politik dalam periode pasca-reformasi telah mengalami konglomerasi, dalam artian bahwa industri-industri media semakin dikooptasi oleh kepentingan-kepentingan para pemilik modal dan oligarki. Abstraksi Tapsell mengenai rezim atau cara kerja dari industri oligarki media di Indonesia mengindikasikan dua modus operandi utama Pertama, oligarki media umumnya memproduksi berita-berita dan informasi yang sesuai dengan keinginannya. Dalam hal ini, Tapsell mengambil argumentasi dari Jeffrey Winters (2013), yang menyatakan bahwa “sejauh media sangat didominasi oleh aktor-aktor dan kekuatan politik yang sama, hampir tidak mungkin bahwa partai atau pers bebas yang kritis akan memberikan tempat dan wahana untuk menantang bentuk-bentuk dominasi oligarki ini”. Kedua, media merupakan entitas yang krusial bagi oligarki dan politisi sebagai medium untuk figurisasi mereka, sehingga politisi dan oligarki memiliki kecenderungan untuk mengkooptasi media-media tersebut.

### **Pers Alternatif**

Kemudian menurut Dagron (2004) pers alternatif (yang merupakan bagian dari media alternatif) merupakan sebuah medium penyaluran keragaman budaya yang tidak muncul (tidak tertangkap) oleh pemberitaan media arus utama yang biasanya memiliki “kepentingan” yang didasarkan oleh modal maupun keberpihakan dari pemilik media tersebut, Lebih lanjut Hamilton (2000) berpendapat bahwa Media alternatif harus dibentuk dengan mengedepankan deprofesionalisasi, dekapitalisasi, dan deintstitusionalis. yang berarti bahwa secara tata kelola media alternatif bisa dibentuk oleh siapapun tanpa diperlukan keahlian (jurnalisme) tertentu. Selain itu, dalam konteks ekonomi media alternatif diharapkan bukan media yang bergantung pada pemodal tertentu serta mencari keuntungan semata, lebih jauh dari itu media alternatif diharapkan bisa menjadi sebuah media yang mengakomodasi mereka yang luput dari media arus utama. Dalam konteks media alternatif di Indonesia.

Sehingga, teori dan konsep ini menekankan pada signifikansi dari media-media baru yang menawarkan perlawanan — *new form of resistance* — terhadap kekuasaan oligarki media. Bagaimana bentuk signifikansi tersebut merupakan tesis utama teori ini: bahwa media kontra-oligarki, dalam struktur dan dinamika media yang semakin dikooptasi oleh Oligarki, aktor politik dan konglomerat media. memiliki beban ganda: 1) Sebagai media independen yang berorientasi sebagai antitesis terhadap media arus utama yang berafiliasi dengan kekuatan politik tertentu; dan 2) Sebagai pengawas dan kekuatan penyeimbang bagi demokrasi dan proses konsolidasi demokrasi.



## **HASIL PENELITIAN**

Di era orde baru terdapat beberapa pers alternatif yang muncul dan membawa warna baru dalam dunia pers di Indonesia seperti majalah asri yang membahas tentang desain interior dan memiliki STT dari Pemerintah sebagai bentuk izin edar media di level mikro (Eddyono, 2021). Kemudian di lingkungan kampus juga terbentuk sebuah pers alternatif yang berfokus dalam membahas kehidupan mahasiswa dan pergerakan sosial politik di tingkat kampus seperti Gelora Mahasiswa yang berdiri pada 1974 oleh Dewan Mahasiswa Universitas Gadjah Mada tetapi dibredel oleh Rektor UGM pada 1979 karena tekanan pemerintah (Atmakusumah, 1981) dan SUMA (Suara Mahasiswa) yang berdiri pada tahun 1992 yang merupakan pers mahasiswa Universitas Indonesia. Namun, kemunculan pers mahasiswa di kampus bisa dikatakan sebagai hal yang menarik dalam melihat bagaimana pemerintah bereaksi terhadap pers yang mempertanyakan serta mengkritisi pemerintah di lingkungan akademik. Hal ini menarik perhatian yang luar biasa dari pemerintah melalui penerapan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) serta pendirian Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) yang berfungsi mengawasi kehidupan politik mahasiswa khususnya di perguruan tinggi negeri seperti UI, ITB, UGM. Untuk meminimalisir adanya gerakan penentangan pemerintah yang berasal dari kampus. Sejak peristiwa Reformasi 1998 dan diterbitkannya UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran terjadi kenaikan yang cukup drastis dalam jumlah lembaga penyiaran yang ada di Indonesia yang sebelumnya berjumlah 11 naik menjadi 1.251 Lembaga (termasuk penyiaran Minor, Regional, maupun Komunitas) pada tahun 2016 (Widyatama, 2020). Pasca berlakunya UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran serta UU No.40 tahun 1999 tentang pers indeks demokrasi Indonesia mengalami peningkatan pula yang sebelumnya berada rezim yang *Authoritarian menjadi Partly Free*. Hal ini terjadi karena walaupun telah terjadi kebebasan dalam media dan pers namun kontrol negara masih belum sepenuhnya hilang dan persekusi yang terjadi pada ranah virtual juga menjadi faktor Indonesia belum mencapai *Full Freedom*.

Kemudian, seiring dengan lahirnya Undang-Undang yang melindungi dan mengatur media dan pers berdampak pada munculnya konglomerasi media di Indonesia, sebagai contoh Bakrie Group yang sebelumnya berfokus di bidang Pertambangan, Minyak, dan Gas Bumi semenjak tahun 1993 mulai masuk ke ranah Media melalui saluran televisi ANTV (ANTV, t.t.) kemudian semakin meluaskan jaringannya dengan merilis kanal media Viva dan

serta TvOne (Kumparan Bisnis, 2021). Hal ini tidak hanya dilakukan oleh Bakrie Group melalui Viva, Bakrie Group juga menggelontorkan dana investasi pada Bumi langit studio besutan joko anwar senilai 30 Miliar Rupiah dimana hal tersebut merupakan salah satu bentuk investasi pada industri perfilman dengan nominal terbesar yang dikeluarkan oleh satu perusahaan (*Investasi Film Lebih dari Rp30 miliar, VIVA, 2019*). Kemudian perkembangan dari aspek sosio-politik, media dan pers juga mengalami pergeseran yang sebelumnya bersifat independen kini rentan bias karena agenda politik yang dimiliki oleh beberapa pemilik stasiun Televisi. Pada Pemilu 2014, Metro TV dan TV One menunjukkan dukungan politik mereka terhadap masing-masing kandidat. Metro TV mendukung Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), sementara TVOne mendukung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta) (Kartinawati dkk., 2020). Hal ini terlihat dari konten berita dan cara penyajian berita yang mengandung unsur dukungan terhadap kandidat yang didukung, seperti menampilkan sisi positif dari kandidat yang didukung dan menampilkan sisi negatif dari kandidat lawan. Dalam beberapa kasus, media tersebut juga menampilkan narasi yang mengarah pada pembelahan sosial dan polarisasi politik. Namun, tidak semua berita yang disajikan oleh Metro TV dan TV One bersifat negatif terhadap kandidat yang tidak didukung.

Diskursus mengenai “Media Kontra Oligarki” memang merupakan diskursus yang baru dalam khazanah kajian-kajian kekuatan politik di Indonesia, secara spesifik kekuatan media. Klausula “Media Kontra Oligarki” sendiri diteoretisikan dan dipopulerkan oleh Ross Tapsell (2021) dalam upayanya menjelaskan mengenai kemunculan media-media independen sebagai antitesis dan juga kompetitor terhadap media-media arustama yang dalam teorinya, diargumentasikan sebagai media-media yang berada dalam pengaruh kuat oligarki-oligarki media. Sebagai pengantar terhadap analisis-analisis berikutnya, penting untuk membedakan antara media non-oligarki dan media-media yang memang memiliki orientasi untuk kontra terhadap oligarki — dengan kata lain, media kontra oligarki. Media non-oligarki adalah platform atau perusahaan media yang tidak dimiliki atau dikuasai oleh konglomerat-konglomerat media, misal situs berita daring dan independen yang memang orientasinya terbatas pada penyebaran informasi dan berita. Berbeda dengan orientasi tersebut, media kontra oligarki merupakan media-media yang secara spesifik didirikan dan berorientasi untuk menjadi antitesis dan kompetitor terhadap mode produksi dari media-media yang dikuasai oleh para oligarki (Tapsell, 2021). Penelitian akan menjelaskan lebih spesifik di bagian khusus mengenai Project Multatuli, salah satu media kontra oligarki di Indonesia.

Sekalipun diskursus mengenai media kontra oligarki merupakan diskursus yang relatif baru dalam khazanah kajian kekuatan politik di Indonesia, apabila ditarik dalam kerangka historis-geneologis, eksistensi dan signifikansi dari media kontra oligarki telah ada jauh melampaui klausulnya. Lim (2011), misalnya, memberikan dua contoh signifikansi dari kemunculan media yang berorientasi untuk mendekonstruksi media-media arus utama, terkhususnya media-media yang dikuasai oleh oligarki: Kasus Cicak vs Buaya — kasus sengketa antara KPK dan Polisi — serta Koin Untuk Prita — sebuah gerakan untuk membantu Ibu Prita melawan ketidakadilan yang dialaminya ketika mengkritik pelayanan salah satu rumah sakit di Jakarta. Dari dua kasus ini, kita dapat memahami bahwa signifikansi utama dari media kontra-oligarki adalah sebagai moda dan juga amplifikator perlawanan terhadap ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat, terkhususnya masyarakat yang tidak memiliki kuasa apapun — dan seringkali tidak diberitakan oleh media-media arus utama dan konglomerasi media. Sekalipun dalam akhir tulisannya Lim menuliskan bahwa “Produksi alternatif — media-media dan produksi berita yang berbeda dengan arus utama media oligarkis — masih terlalu kecil (signifikansi nya) untuk menentang berita arus utama” (Lim, 2011). Kedua kasus tersebut mengindikasikan adanya bentuk gerakan perlawanan baru terhadap media-media oligarki (Siregar, 2014). Dalam melihat pembeda antara Project multatuli dengan pers alternatif lainnya adalah fokus dari pemberitaan dan keberpihakan yang dibawa oleh project multatuli, walaupun project multatuli hadir sebagai Public Service Journalism yang berusaha untuk mengangkat pemberitaan yang berfokus kepada kepentingan rakyat khususnya dalam mengangkat suara kerap luput dari pemberitaan arus utama. Namun, walaupun fokusnya adalah pemberitaan yang berpihak terhadap rakyat, Project Multatuli cukup vokal dalam memberitakan kritik terhadap pemerintah atas ketidakadilan dan penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah (Achyansyah, 2022). Meskipun terlihat seperti media yang disponsori oleh oposisi nyatanya project multatuli tidak mengambil kesempatan untuk bergabung bersama oposisi pemerintah dalam mengkritik pemerintah karena fokus mereka bukan semata mata mengkritik pemerintah tapi menyuarakan kepentingan rakyat khususnya rakyat yang menjadi kelompok marjinal dalam kehidupan sosial di Indonesia. Sebagai bentuk keberpihakan terhadap rakyat dan kelompok marjinal, Project Multatuli juga secara khusus membuat serial #HilirisasiOligarki yang membahas tentang oligarki di Indonesia dengan model pemberitaan investigasi dan mengangkat cerita dari masyarakat yang terdampak langsung. Contohnya berita bertajuk

“Kami Dibiarkan Berkelahi’: Petani Morowali Utara Terimpit Perkebunan Sawit dan Industri Nikel” tentang bapak wahono, seorang pengemudi truk pasir di Morowali Utara yang terdampak dengan kehadiran smelter nikel di wilayahnya, salah satu yang menjadi sorotan dalam berita ini adalah ketidakadilan dalam pembebasan lahan dengan harga yang sangat rendah serta dampak ekologis seperti aliran air yang digunakan oleh smelter menyebabkan banyak air yang menggenangi rumah dan jalan yang dilalui warga

## **PEMBAHASAN**

Sebagaimana orientasi dasar dari media kontra-oligarki, Project Multatuli juga merupakan salah satu media yang mengamplifikasi “perlawanan” terhadap rezim industri media di Indonesia yang didominasi oleh konglomerasi media. Project Multatuli memang tergolong sebagai media baru dalam lanskap industri media di Indonesia. Didirikan pada tanggal 21 Mei 2021 oleh tiga jurnalis senior Ahmad Arif, Evi Mariani, dan Fahri Salam, Project Multatuli berfokus untuk menyediakan berita-berita alternatif berbasis Jurnalisme Kolektif.

Sebagai instrumen pengawas dan oposisi non-parlemen terhadap pemerintah, konten-konten dalam Project Multatuli merupakan produk jurnalisme berbasis investigasi dan cerita yang mengambil keberpihakan politik dalam spektrum yang bertentangan dengan kekuasaan. Sebagai contoh, Esai Muhammad (2022) bertajuk “IKN Bukan Bunker Oligarki” yang mendekonstruksi upaya pemerintah untuk menjadikan IKN sebagai lokus “para oligarki” dengan menggusur dan melakukan *displacement* terhadap rakyat dan masyarakat adat di sana; Serial mengenai Wadas, salah satunya yang ditulis oleh Project Multatuli (2022) bertajuk “Merekam Kekerasan Polisi di Desa Wadas: Warga Wadas Dikepung, Ditangkap, dan Ditahan” yang membahas mengenai kekerasan struktural yang dilakukan oleh polisi terhadap warga Wadas, dan masih banyak lainnya. Untuk melihat bahwa Project multatuli mengambil sikap sebagai oposisi terhadap pemerintah namun tidak mengambil celah untuk bergabung bersama oposisi pemerintah yang ada di parlemen dapat dilihat dari pemberitaan tentang pemilihan presiden di Indonesia tahun 2024 salah satu contohnya adalah reportase bertajuk “Di Balik Timnas AMIN: Tambang, Unicorn, dan Mantan Koruptor” yang membedah kelompok pebisnis tambang, media, *start up*, hingga Koruptor yang ikut berbaris mendukung Anies Baswedan untuk menjadi presiden dalam pemilihan presiden tahun 2024 (Project Multatuli, 2024). Reportase ini berkolaborasi dengan Jaring.Id dan Deduktif.Id untuk menghimpun informasi yang ada. Pemberitaan ini menjadi penegasan posisi Project Multatuli sebagai

oposisi terhadap pemerintah dan juga kepada oligarki, pasalnya Project Multatuli memiliki kesempatan bekerjasama dengan paslon Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar sebagai pasangan calon yang menjadi figur oposisi dengan mengusung “Perubahan” terhadap pemerintahan Jokowi tetapi hal itu tidak dilakukan karena kembali ke tujuan awal bahwa Project Multatuli hadir sebagai media yang membawa kepentingan rakyat dan mengawasi para penyelenggara negara dari luar sistem lembaga negara yang ada di Indonesia.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apa signifikansi dari keberadaan media-media alternatif (yang tidak dimiliki atau memiliki relasi dengan oligarki media) di Indonesia? Sebagaimana telah dipaparkan di awal, kekuatan politik yang dominan di Indonesia, tidak hanya dalam sektor industri media tetapi juga dalam segala sektor, adalah kekuatan-kekuatan politik yang didominasi oleh para oligarki. Hadiz dan Robison (2013), dalam tesis mereka mengenai oligarki, menyatakan bahwa pasca-reformasi, sekalipun kekuatan otoriter sudah mengalami degradasi yang signifikan, kekuatan-kekuatan oligarki tetap melakukan penetrasi ke sistem dan praktik politik dan bisnis yang baru. Dalam argumentasi mereka, terjadi “penataan ulang atas relasi-relasi kuasa lama yang predatoris ke dalam sistem yang baru ... oleh mereka yang memiliki kepentingan dalam menjaga kekuasaan dalam sistem yang arbitrer” (Hadiz & Robison, 2013). Secara spesifik dalam sektor industri media, Winters (2013) mengemukakan bahwa oligarki media merupakan salah satu kekuatan dominan yang “menentukan arah dan kebijakan dari industri media ... Hal ini menjadi berbahaya mengingat bahwa media merupakan salah satu pilar dari demokrasi” (Winters, 2013). Dari argumentasi Winters tersebut, kita dapat menarik kesimpulan apabila: 1) Media adalah pilar penjaga demokrasi — dalam beberapa literatur, disebutkan bahwa media merupakan “*4th pillar of democracy*” selain dari kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif ; dan 2) Kooptasi dari kekuasaan oligarki dan konglomerat media merupakan ancaman nyata terhadap demokrasi. Project Multatuli menjadi pengawas (watchdog) terhadap praktik-praktik kekuasaan yang merusak demokrasi.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Dari kondisi-kondisi serta analisis tersebut, dapat dilihat signifikansi dari Project Multatuli — sebagai media kontra-oligarki. Pertama, Project Multatuli memiliki orientasi untuk menjadi media yang independen — dari kuasa uang dan konglomerasi media — di

tengah era dimana independensi media sedang diguncang secara struktural oleh spesialisasi dari konglomerat dan oligarki media (Masduki, 2021). Independensi ini membuat Project Multatuli dapat mendiversifikasi konten-kontennya dan mengangkat “suara-suara” yang selama ini kerap luput bahkan tidak diangkat oleh media-media arustama yang memiliki afiliasi dengan kekuatan politik tertentu maupun bisnis. Kedua, Project Multatuli juga memiliki signifikansi untuk menjadi pilar penjaga demokrasi. Di era yang ditandai oleh keberpihakan media terhadap kekuasaan (Djoewanto, 2011; Nugroho dkk., 2013). Project Multatuli menjadi pengawas (watchdog) terhadap praktik-praktik kekuasaan yang merusak demokrasi serta melakukan investigasi terhadap aktor oligarki dengan tetap menjaga independensinya melalui pembebasan dari iklan, memberi jaminan bahwa hanya berkolaborasi dengan pihak yang menghormati independensi Project Multatuli, dan skema *paywall based subscription* sebagai pendapatan utama yang bersumber dari para pembaca yang memilih untuk berlangganan terhadap Project Multatuli.

## **Saran**

Berdasarkan temuan dan hasil penelitian tersebut peneliti melihat bahwa kehadiran media arustama di Indonesia ternyata tidak lepas dari adanya pengaruh aktor politik di belakangnya yang menguasai media baik secara kepemilikan maupun karena kedekatan dengan penguasa yang akhirnya menimbulkan sebuah produk jurnalistik yang tidak sesuai dengan kaidah jurnalisme serta di beberapa media secara implisit memperjelas keberpihakannya terhadap seseorang atau kelompok melalui bahasa maupun durasi pemberitaan. Project Multatuli merupakan amplifikasi dari perlawanan terhadap media arustama yang di belakangnya berada penguasa penguasa yang hendak mengontrol media, kemudian Project Multatuli juga menjadi sarana untuk memproduksi kaidah jurnalisme yang sesuai namun karena hal tersebut, beberapa kali Project Multatuli mendapatkan beberapa serangan siber yang diduga berasal dari pihak-pihak yang merasa resah dengan kehadiran Project Multatuli ini dan pada akhirnya Project Multatuli ini menjadi bentuk perjuangan demokrasi dalam media di negara Indonesia dimana banyak medianya yang sudah tidak netral dan cenderung memiliki keberpihakan politik.

Untuk itu penting bagi setiap pers alternatif untuk memiliki keberpihakan yang jelas dengan pemberitaan yang berkualitas agar bisa merefleksikan kepentingan publik yang menjadi landasan perjuangan pers alternatif, kemudian melihat maraknya percobaan

peretasan dan serangan siber terhadap Project Multatuli, penting juga untuk memiliki perlindungan siber serta antisipasi dengan mencetak arsip berita agar memiliki bukti analog dari hasil pemberitaan yang berpotensi kapanpun bisa hilang dari internet. Terakhir, sebagai salah satu strategi penguatan independensi pers melalui skema *paywall based* dapat digunakan sebagai salah satu perangkat utama dalam meraih pendapatan guna mendorong operasionalisasi lembaga pers yang independen. Namun, perlu diperhatikan bahwa skema tersebut harus diantisipasi dengan adanya dana tambahan dari luar yang tidak mengganggu independensi dari sebuah lembaga pers karena selain menjaga independensi terdapat kesejahteraan jurnalis yang juga harus diperhatikan dalam operasionalisasi lembaga pers.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Achyansyah, M. N. (2022). Kajian Analisis Kritis Norman Fairclough Dalam Pemberitaan Project Multatuli “Wadon Wadas Menjaga Alam Untuk Anak-Cucu.” *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*, 4(2), 85–100. <https://doi.org/10.24843/JIWSP.2022.v04.i02.p02>
- Agustini, S. (2019). Jaminan Kebebasan Pers Di Indonesia. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, 1(2), 172–177. <https://doi.org/10.33559/esr.v1i2.276>
- ANTV. (t.t.). *Tentang Kami—ANTV Klik*. Diambil 12 Januari 2022, dari <https://www.antvklik.com/tentang-kami>
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy in Indonesia: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press.
- Atmakusumah. (1981). *Kebebasan Pers dan Arus Informasi di Indonesia*. Lembaga Studi Pembangunan.
- Borgh, C. van der, & Terwindt, C. (2014). National Contexts: Partial Democratization and Civil Society. Dalam *NGOs under Pressure in Partial Democracies*. Palgrave Macmillan.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Dagron, A. G. (2004). *The Long and Winding Road of Alternative Media*. SAGE Publications.

Djoewanto, I. H. (2011). Media ownership and its implications for journalists and journalism in Indonesia. Dalam K. Sen & D. Hill (Ed.), *Politics of Media in Twenty First Century Indonesia*. Routledge.

Eddyono, A. S. (2021). Pers Alternatif pada Era Orde Baru: Dijinakkan hingga Dibungkam. *Komunika*, 8(1), 53–60. <https://doi.org/doi.org/10.22236/komunika.v8i1.5672>

Farafonova, I. (2023). The Influence Of Mass Media On The Electorate. *Politology Bulletin*, 91, 88–101. <https://doi.org/10.17721/2415-881x.2023.91>

Ford, M., & Pepinsky, T. B. (2013). *Beyond Oligarchy? Critical Exchanges on Political Power and Material Inequality in Indonesia*. Cornell University Press.

Hadiz, V. R., & Robison, R. (2013). *The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia*. Cornell University Press.

Hamilton, J. (2000). Alternative Media: Conceptual Difficulties, Critical Possibilities. *Journal of Communication Inquiry*, 24(4), 357–378. <https://doi.org/DOI:10.1177/0196859900024004002>

Haris, S. (2019). *Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Harizuandini, L., Kurniawati, & Martini, S. (2022). Alternative Media Criticism Towards the New Order Government Ahead of The July 27th, 1996, Incident. *ICHELSS: International Conference on Humanities, Education, Law, and Social Sciences*, 2(1), 541–559.

*Investasi Film Lebih dari Rp30 miliar, VIVA: Produksi Film Indonesia Termahal*. (2019). Bisnis.com. <https://market.bisnis.com/read/20190529/7/929097/investasi-film-lebih-dari-rp30-miliar-viva-produksi-film-indonesia-termahal>

Kaid, L. L., & Holtz-Bacha, C. (2008). *Encyclopedia of Political Communication*. SAGE Publications.



- Kartinawati, E., Pawito, Warto, Wijaya, M., & Purwasito, A. (2020). Political Preference of Media Owner Power Abuse, And Bias (Case On Private Televisions In Indonesia). *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7). <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/3092>.
- Khairida, Syahrizal, & Din, Mohd. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak Dalam Sistem Peradilan Jinayat. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(1), 169–186. <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i1.12282>
- Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2001). *The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know And The Public Should Expect*. Random House.
- Kumparan Bisnis. (2021). *Bakrie Luncurkan Bisnis Konten Video Digital, Kolaborasi dengan tvOne dan Antv*. kumparan. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/bakrie-luncurkan-bisnis-konten-video-digital-kolaborasi-dengan-tvone-dan-antv-1wMkUghhZK6>
- Lim, M. (2011). *Democratization and Corporatization of Media in Indonesia*. Participatory Media Lab Arizona State University.
- Masduki. (2021). Independensi Media dan Kuasa Uang di Indonesia. Dalam Wijayanto, A. P. Budiatri, & H. P. Wiratraman (Ed.), *Demokrasi Tanpa Demos*. LP3ES Publishing.
- Muhammad, J. (2022). *IKN Bukan Bungker Oligarki*. Project Multatuli. <https://projectmultatuli.org/ikn-bukan-bungker-oligarki/>
- Nugroho, Y., Putri, D. A., & Laksmi, S. (2013). *Mapping The Landscape of The Media Industry in Contemporary Indonesia*. Centre for Innovation Policy and Governance.
- Padiatra, A. M. (2015). Ketika Pers Bicara Korupsi: Analisis Tajuk Rencana Harian Pedoman pada Awal Orde Baru 1969 – 1974. *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya*, 5(2), 103–117. <https://doi.org/10.17510/paradigma.v5i2.51>
- Power, T., & Warburton, E. (2020). *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression?* ISEAS Publishing.

Pratama, C. D., & Gischa, S. (2020). *Pers di Era Orde Baru*.  
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/22/165353669/pers-di-era-orde-baru?page=>

Priyonggo, A., & Adnan, H. M. (2021). Digitizing Newspaper Content in Indonesia: The Challenge of Enforcing The Culture of Immediacy. *Jurnal Komunikasi; Malaysian Journal of Communication*, 37(2), 258–271. <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2021-3702-16>

Project Multatuli. (t.t.). *Tentang Project Multatuli*. Project Multatuli. Diambil 31 Januari 2024, dari <https://projectmultatuli.org/tentang/>

Project Multatuli. (2022). *Merekam Kekerasan Polisi di Desa Wadas: Warga Wadas Dikepung, Ditangkap, dan Ditahan*. Project Multatuli. <https://projectmultatuli.org/cara-polisi-melakukan-kekerasan-ke-warga-wadas-penolak-tambang-andesit-saat-mengepung-desa-wadas-februari-2022/>

Project Multatuli. (2024). *Di Balik Timnas AMIN: Tambang, Unicorn, dan Mantan Koruptor*. <https://projectmultatuli.org/di-balik-timnas-amin-tambang-unicorn-dan-mantan-koruptor/>

Ramadhiyanti, A. A., & Salendu, A. (2022). Peran Grit sebagai Moderator Hubungan Antara Ketidakamanan Kerja Dan Kepuasan Kerja Pada Karyawan Terdampak Kebijakan Covid-19 Indonesia. *Efektor*, 9(1), 155–168. <https://doi.org/10.29407/e.v9i1.17084>

Siregar, A. E. (2014). *Mengawal Demokratisasi Media: Menolak Konsentrasi, Membangun Keberagaman*. Kompas Gramedia.

Suwirta, A. (2008). Dinamika Kehidupan Pers di Indonesia pada Tahun 1950–1965: Antara Kebebasan dan Tanggung Jawab Nasional. *Sosiohumanika*, 1(1). <https://doi.org/10.2121/sosiohumanika.v1i2.336>

Tapcell, R. (2021). *Kuasa Media di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga, dan Revolusi Digital* (W. P. Utomo, Penerj.). Tangerang.

Tivany, A. H. (2022). *Challenges For Alternative Journalism in Indonesia: A Case Study of Project Multatuli* [Thesis, Univerzita Karlova].  
<http://hdl.handle.net/20.500.11956/176422>

Wagstaff, J. (2010). *Southeast Asian Media: Patterns of Production And Consumption*. Open Society Institute.

Widyatama, R. (2020). Jangkauan Siaran Televisi Swasta di Indonesia: Sebuah Tinjauan Ekonomi Politik. *Communicare : Journal of Communication Studies*, 7(2), 190–211.  
<https://doi.org/10.37535/101007220206>

Wijayanto, Budiatri, A. P., & Wiratraman, H. P. (Ed.). (2021). *Demokrasi Tanpa Demos*. LP3ES Publishing.

Winters, J. A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge University Press.

Winters, J. A. (2013). *Oligarchy and Democracy in Indonesia*. Cornell University Press.

Yoedtadi, M. G., & Pribadi, M. A. (2020). Alternative Media as Counter-Hegemony: A Case study of Konde.co and Magdalene.co. *Proceedings of the 2nd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities*. Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201209.013>